

# KONFLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI PESISIR TELUK BANTEN

**Juliannes Cadith**  
**Dosen Prodi Administrasi Publik**  
**Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**  
**e-mail :j.cadith@yahoo.com**

## ABSTRAK

Konflik sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Banten. Karena begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten, pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman dan penyelarasan berbagai kepentingan tersebut, Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, Penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya di pesisir Teluk Banten. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif - kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dan Konflik antara swasta dengan masyarakat, dimana masing konflik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Sumber atau penyebab konflik di pesisir Teluk Banten adalah ; a. Perubahan karakteristik wilayah pesisir yang semula "open acces" menjadi "controlled access", b. Perbedaan Kepentingan, c. Tujuan Bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang d.Kerusakan atau degradasi lingkungan, e. Pembatasan akses serta Ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang. Penyelesaian konflik di pesisir Teluk Banten dapat menggunakan metode coercion , arbitration , mediation, compromise, hingga Adjudication sesuai dengan karakteristik konflik yang dihadapi.

Kata Kunci : konflik, Sumber daya pesisir, pengelolaan, Teluk Banten

## ABSTRACT

*Conflict is already part of the conditions that occur in the coastal area of Banten Bay. Because there are so many interests involved in the utilization of the coastal resources of Banten Bay, the management of the Banten Bay coastal area needs to be built based on understanding and aligning these various interests. The purpose of this study is to find out 1. the map of conflicts in coastal resource use, 2. the causes conflicts in the use of coastal resources 3. the effective conflict resolution in resolving conflicts that occur in the resource use on the coast of Banten Bay. The method used in this research is descriptive - qualitative method. The results of the study show that the conflicts that occur can be grouped into conflicts between one community with another community, the government with the community and the conflict between the private sector and the community, where each conflict has different characteristics. The sources or causes of the conflict on the coast of Banten Bay are; a. The change in the characteristics of the coastal areas from "open access" into "controlled access", b. The difference of interests, c. The competitive objectives that trigger competition in spatial use d. The damage or environmental degradation, e. The*

*restrictions on access and inequity in the distribution of development outcomes are seen as imbalances in spatial use. To resolve the conflicts on the coast of Banten Bay can use coercion, arbitration, mediation, compromise, and proper adjudication in accordance with the characteristics of the conflict faced.*

*Keywords: Conflict, Coastal Resources, Management, Banten Bay*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fisher et. Al, 2001 yang mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang merasa memiliki sasaran atau tujuan yang tidak sejalan. Konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. alasannya sederhana, karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan,kepentingan dan selalu berupaya untuk mengoptimalkan tujuannya. Selain itu karakter wilayah yang sangat dinamis yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain yang disebabkan oleh dimilikinya dua aspek kewilayaan yaitu ruang daratan dan ruang laut (Habtemariam, 2016).

Sebagaimana yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten. Pesisir Teluk Banten merupakan sebuah kawasan yang strategis dan penting di Provinsi Banten, pentingnya pesisir Teluk Banten dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu 1. Nilai sejarah terkait dengan fungsi cagar budaya yang melekat

dengan eksistensi Kesultanan Banten di masa lalu. 2. Nilai lingkungan terkait dengan fungsi konservasi yang melekat di kawasan tersebut dengan adanya Pulau Burung dan ditambah kawasan ini memiliki ekosistem pesisir yang cukup lengkap dengan keberadaan ekosistem mangrove, padang lamun, terurumba karang. 3. Nilai ekonomi terkait dengan keberadaan berbagai aktivitas perekonomian yang berlokasi di Pesisir Teluk Banten seperti a. Kawasan industri di Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwattu yang tergolong industri besar dan menengah; b.Fishing ground bagi nelayan – nelayan yang ada di enam kecamatan yang berada di pesisir Teluk Banten. c. merupakan salah satu lumbung padi Provinsi Banten. d. Merupakan kawasan minapolitan di Provinsi Banten yang terletak di Domas dan Karangantu. 4. Jasa Lingkungan, terkait dengan keberadaan Pelabuhan Bojonegara sebagai terminal umum serta terminal untuk kepentingan sendiri ( TUKS) yang dimiliki oleh berbagai perusahaan yang berada di kawasan pesisir Teluk Banten. (merupakan alur pelayaran yang cukup ramai) 5 Nilai

keamanan , sebagai tempat latihan kapal selam milik TNI AL.

Beragamnya fungsi, nilai dan jasa lingkungan yang dimiliki kawasan pesisir Teluk Banten seperti yang dijelaskan diatas menggambarkan begitu banyak dan beragamnya kepentingan yang terdapat di Pesisir Teluk Banten, hal tersebut menjadikan kawasan tersebut begitu rawan akan konflik antar sektor. Berbagai konflik antar sektor yang terjadi diantaranya adalah konflik antara sektor industri dengan sektor pertanian, sektor industri dengan sektor perikanan, begitu juga antara kepentingan sektor pertambangan dengan sektor perikanan serta pemanfaatan untuk konservasi dengan budidaya ikut memicu konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Konflik juga terjadi antar aktor (Masyarakat , swasta/pengusaha) dan pemerintah) baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal. dimana masing - masing pihak berupaya untuk mengoptimalkan kepentingannya, tidak tegas dan tidak jelasnya pengaturan tata ruang dan peraturan yang mengatur para pengguna wilayah pesisir dan laut ikut berkontribusi terhadap Kontestasi di antara para aktor tersebut. Tingginya konflik antar aktor dan sektor merupakan indikasi bahwa pengelolaan yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial sehingga menjadi tidak sinergis dan efektif karena

berbagai kepentingan itu satu sama lain bertabrakan dan tidak ketemu.

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, mengidentifikasi penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta mencari resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya di pesisir Teluk Banten.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong metode penelitian deskriptif-kualitatif, di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemetaan Konflik**

Konflik yang terjadi di pesisir Teluk Banten secara umum dipengaruhi oleh persaingan (kontestasi) sektoral terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan jasa lingkungan antara berbagai aktor yang ada di pesisir Teluk Banten.

Secara historis kita melihat bagaimana wilayah Pesisir Teluk Banten pada awalnya merupakan wilayah dengan penggunaan ruang untuk tempat permukiman, pertanian, perikanan

khususnya perikanan tangkap serta konservasi, dulunya kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang asri dimana kondisi lingkungannya sangat terjaga, seiring dengan perubahan paradigma pembangunan di era orde baru dimana pertumbuhan menjadi panglima terjadi perubahan dratis dalam pemanfaatan wilayah pesisir, pemanfaatan pesisir dan laut diarahkan pemanfaatannya sebesar – besarnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengisyaratkan bagaimana pesisir termaksud dengan segala potensinya dan fungsi yang dimilikinya harus memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan daerah sehingga bisa dipahami berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pesisir Teluk Banten.

Laju pembangunan di Provinsi Banten dengan ditetapkannya kawasan Cilegon, Bojonegara, Kramatwattu dan Polo Ampel sebagai kawasan industri mendorong berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan ruang di Teluk Banten yang semakin tinggi yang melibatkan berbagai kepentingan telah mendorong terjadinya persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan atau degradasi lingkungan.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten dilakukan

cenderung mengabaikan daya dukung yang di milikinya, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir seperti terjadinya penambangan pasir laut, alih fungsi hutan mangrove, padang lamun untuk reklamasi dan tambak ikan sehingga menimbulkan degradasi lingkungan di Teluk Banten.

Bertambahnya penggunaan ruang di wilayah pesisir Teluk Banten khususnya untuk pemanfaatan ruang oleh industri telah meningkatkan kompleksitas dari kepentingan ekonomis penggunaan ruang karena ruang merupakan sumberdaya yang tidak tak terbatas, maka perbedaan kepentingan akan banyak dijumpai dalam ruang tempat hidup manusia kemudian kondisi ini diperkeruh dengan batas yurisdiksi administratif yang dimiliki oleh berbagai tingkat dan sektor pemerintahan di wilayah pesisir yang sangat terfragmentasi ikut memicu konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir di Teluk Banten.

Melihat pada beberapa fakta tersebut, cukup jelas bahwa secara wajar konflik memang sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Banten. Menyadari akan sifat dari konflik kepentingan yang

menjadi bawaan dasar (*inherited*) di wilayah pesisir Teluk Banten, maka pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman dan penyesuaian berbagai kepentingan tersebut. Sistem pengelolaan yang secara fisik diterapkan dalam bentuk pengaturan jenis dan batas pemanfaatan, perlu disusun berdasarkan konsep pemecahan (resolusi) dari berbagai konflik yang sudah atau diperkirakan akan terjadi. Untuk itulah resolusi konflik harus menjadi bagian yang baku dari pengaturan penggunaan ruang, khususnya di wilayah yang kompleks seperti halnya pesisir.

Untuk itu diperlukan Identifikasi dan pemetaan konflik terhadap berbagai kegiatan (zona) di kawasan pesisir yang bersinggungan atau berdekatan, baik yang berpotensi tidak sesuai (*compatible*)

maupun yang sesuai di antara keduanya (Diposaptono 2015).

Fisher *et al* (2001), membagi pola konflik dalam tiga bentuk, yakni konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan. Konflik laten sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Berikut ini merupakan peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten

Tabel 1 Peta Konflik Di Pesisir Teluk Banten

Konflik	Pihak – pihak yang terlibat Konflik	Area Konflik	Karakteristik Konflik
Konflik antara nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut	Nelayan melawan perusahaan penambang pasir laut.	Perairan Pulau Tunda, Lontar	- Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal
Konflik antara nelayan dengan Kalangan Industri	Nelayan Melawan perusahaan/ industri	Bojonegara, kramatwatu dan Polo Ampel	- Mencuat (Emerging) - Konflik Vertikal
Konflik antara industri	PT Jawa tujuh (Indonesia Power) dengan wilmart	Bojonegara	- Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal
Konflik Antara Nelayan	- Nelayan pendukung penambangan pasir laut dengan Penentang penambangan pasir	Perairan Pulau Tunda, Lontar	- Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal

	laut. - Konflik antara nelayan Budidaya Bandeng binaan wetland yaitu KPAPPD (Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua) dengan nelayan Budidaya Lainnya	Kasemen	- Tertutup (Latent) - Konflik Horizontal
Konflik antara Nelayan dengan pengelola pulau dua	Nelayan Budidaya ikan (Penambak) dengan pengelolah Pulau dua	Pesisir kasemen	Konflik Tertutup (Latent)
Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima	Pemerintah dengan Pedagang kali Lima	Kasemen	Konflik Tertutup (Latent)
Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten	Konflik Antara Kelompok Pak Abbas dengan kelompok Bambang Sageni	Kasemen	Mencuat (Emerging)
Konflik antara pengelolah pelabuhan dengan nelayan	Konflik antara nelayan dengan pengelolah Pelabuhan.	Sepanjang Pantai Bojonegara – Polo Ampel	Mencuat (Emerging)
Konflik Tanah Timbul	Konflik antara pemerintah dengan masyarakat	Di sepanjang pantai kasemen	Tertutup (Latent)

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari pemetaan tersebut dapat dikelompokkan konflik-konflik tersebut kedalam tiga katagori yaitu; konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan swasta ;

a. Konflik masyarakat dengan masyarakat ini merupakan konflik horizontal, terjadi beberapa konflik yang pertama konflik antara nelayan budidaya binaan wetland yaitu KPAPPD (Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua) dengan nelayan budidaya lainnya yang bukan binaan wetland. Karakteristik konflik ini merupakan konflik tertutup

(latent) dan bersifat Horizontal. Konflik pada awalnya disebabkan terjadinya kecemburuan masyarakat/nelayan kepada kelompok KPAPPD yang merupakan kelompok binaan wetland, masing - masing anggota KPAPPD mendapatkan hak 4 samapi 5 hektar untuk mengolah tambak bandeng dengan kewajiban menanam dan memelihara magrove di pematang tambak. Keanggotaan KPAPPD dianggap merupakan hasil nepotisme dari salah satu pengurusnya, persoalan ini kemudian melebar ke persoalan produktivitas hasil tambak

nelayan budidaya lainnya yang menurun yang diduga disebabkan oleh tambak – tambak Anggota KPAPPD yang ditanami magrove dipematangnya dianggap menjadi tempat hunian predator ikan Bandeng. Kedua, Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten. Karakteristik konflik ini terbuka dan bersifat horizontal. Konflik ini merupakan konflik legitimasi mengenai siapa pewaris yang sah kesultanan Banten. Pihak- pihak yang berhadapan dalam konflik ini adalah kelompok pak Abbas dengan kelompok Bambang Nusageni. Konflik legitimasi ini bisa menjadi pemicu terjadinya konflik yang lebih besar, dimana masing - masih pihak merasa benar dan berupaya untuk memperluas pengaruh dan legitimasinya di tataran lokal maupun nasional, Konflik ini semakin meruncing ditengah proses revitalisasi Banten lama. ini tentu saja ikut mempengaruhi interaksi atau relasi antar aktor dalam proses revitalisasi. Ketiga antara kelompok masyarakat yang mendukung penambangan pasir laut dengan masyarakat lainnya. Karakteristik konflik ini merupakan konflik terbuka dan bersifat horizontal.. Konflik terjadi antar anggota masyarakat yang pro dan kontra penambangan pasir laut dimana pihak yang pro dianggap mendapatkan

keuntungan dari kegiatan penambangan pasir laut dan mendukung kegiatan tersebut. Keempat Konflik antara industri dalam pemanfaatan sumber daya pesisir misalkan antara jawa tujuh (Indonesia Power) dengan wilmart, Jawa tujuh (Indonesia Power) membutuhkan air laut untuk di alirkan ke generator PLTU untuk mendinginkan generator PLTU sedangkan pihak wilmart merasa bahwa pipa yang di pasang dilaut oleh pihak jawa tujuh (PLTU) merupakan wilayah Wilmart sedangkan jawa tujuh merasa itu wilayah jawa tujuh, dimana masing – masing pihak merasa lebih berhak dan pihak yang lain melakukan pelanggaran sehingga terjadi konflik antara pemanfaatan antara jawa tujuh dengan wilmart

- b. Konflik antara pengusaha/swasta dengan masyarakat, ini merupakan konflik vertikal yang disebabkan adanya ketidak seimbangan sumber daya. Dimana nelayan atau masyarakat selalu berada dalam posisinya yang lemah. Ada beberapa konflik yang terjadi yang pertama konflik antara nelayan dengan perusahaan penambang pasir laut, Karakteristik konflik ini merupakan konflik terbuka dan bersifat konflik vertikal. Aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Banten diindikasikan merusak

ekosistem Teluk Banten dan memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan nelayan serta penambangan pasir laut menyebabkan perubahan arus laut yang menyebabkan abrasi mengarah ke timur yang tadinya hanya berada di wilayah Tanjung Pontang sekarang mengarah ke pemukiman masyarakat. Penolakan terhadap kegiatan penambangan pasir laut ini termanifestasi pada begitu maraknya demonstrasi penolakan terhadap kegiatan ini. Dan sering kali masyarakat melakukan gangguan dan perusakan terhadap kelancaran operasi penambangan pasir laut.

kedua antara Konflik antara nelayan dengan kalangan industri. Karakteristik konflik bersifat emergent (muncul), berbagai aktivitas industri berpotensi menyebabkan konflik seperti Buangan limbah industri, aktivitas reklamasi pantai berdampak terganggunya ekosistem sekitar pantai. Kondisi ini diperkuat dengan adanya beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Teluk Banten mengalami pencemaran. Diantaranya adalah Rochyatun *et al.* (2005), Simanjuntak(2007), dalam Ernaningsih dwi et al(2011), hasil penelitian Rochyatun menyatakan bahwa Teluk Banten telah mengalami pencemaran yang dominan disebabkan

oleh buangan limbah industri diikuti limbah dari rumah tangga dan kapal yang melintasi teluk Banten, Hasil Penelitian simanjuntak menunjukkan Simanjuntak (2007) yang mengatakan kadar oksigen terlarut yang tertinggi ditemukan di lapisan permukaan (0 m), Muchtar (2002), mengatakan bahwa kandungan fosfat dan nitrat di Pantai Bojonegara lebih tinggi pada bulan April dan Oktober tahun 2001. Wijaya dan Ismail (2007), menyatakan bahwa produktivitas primer perairan teluk yang terdapat di Kecamatan Bojonegara, Cilegon, dan Serang relatif lebih rendah daripada kawasan-kawasan lainnya. Hal ini dikarenakan di kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai limbah yang diakibatkan baik industri dan domestik yang hampir 100% mengalir ke dalam teluk

Ketiga, Konflik antara pengelola pelabuhan dengan nelayan, karakteristik konflik ini bersifat emergent serta bersifat konflik vertikal. Tingginya frekuensi mobilitas kapal yang masuk keluar teluk Banten memberikan dampak tersendiri bagi nelayan kecil yang beropersi di perairan sekitar Teluk Banten. seperti jaring nelayan tersangkut jangkar, tertabraknya perahu nelayan hingga limbah oli yang bisa mencemari perairan sedangkan proses ganti rugi terlalu berbelit – belit2

dan yang di bayarkan tidak sesuai harapan.

Konflik Ekternal Antara nelayan dengan non nelayan dalam pemanfaatan sumber daya selalu menempatkan posisi nelayan terpinggirkan dan selalu di rugikan dan selalu berada posisi tawar menawar yang rendah. Hasil penelitian Kinseng (2007) menunjukkan, Para nelayan seringkali menghadapi dominasi kekuatan eksternal yang mengganggu bahkan menghancurkan sumber daya alam yang merupakan sumber hidup yang merupakan mata pencarian mereka. Hal ini akan memicu munculnya konflik eksternal atau konflik antara nelayan dan pihak – pihak non nelayan.

- c. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik ini merupakan konflik yang mencuat(emergent) dan merupakan konflik vertikal. Satria (2009) menjelaskan penyebab konflik pemerintah dan masyarakat terjadi pertama Pertama, ketika pemerintah sebagai pelindung SDA menggunakan kebijakan dengan menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi sehingga mengeliminasi hak-hak masyarakat dalam mengakses dan mengontrol sumber daya. Kedua, ketika pemerintah sebagai agen pembangunan menggunakan otoritasnya untuk memberikan hak pemanfaatan SDA

kepada pihak-pihak tertentu (korporasi) sehingga SDA yang tadinya berstatus sebagai *common property* menjadi *privat property* Ada beberapa konflik yang terjadi pertama konflik antara pengelola pulau burung dengan nelayan budidaya. Pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya menetapkan kawasan pulau burung sebagai kawasan konservasi .....

- d. , kedua konflik antara pedagang kaki lima dengan pemerintah dalam penataan pedagang di kawasan Banten Lama, ketiga konflik dalam penentuan sepandan pantai, dimana garis pantai terus berubah akibat abrasi dan sedimentasi ketika terjadi sedimentasi masyarakat mengklaim kembali tanah tersebut.

### **Sumber Konflik**

Para pakar mengungkapkan bahwa sebagian besar konflik atas sumberdaya alam mempunyai sebab-sebab ganda, biasanya kombinasi dari masalah-masalah dalam hubungan antara pihak bertikai yang mengarah pada konflik terbuka. Karena sering kali menjadi rumit, sangat penting untuk mendefinisikan permasalahan pokok atau penyebab pertikaian dengan mengamati dan memahami pihak-pihak yang bertikai. Penyebab konflik yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir di Teluk Banten adalah perbedaan

kepentingan, tujuan bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan atau degradasi lingkungan.

Dengan merujuk kepada definisi wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No.27/2007 Jo UU No 1/2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau - pulau kecil). pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan harus memperhatikan dua aspek kewilayaan, yaitu aspek ruang daratan dan aspek ruang perairan (laut) (Makino *et al.*, 2013; dalam Mujiyo *et al* :

2016). karena itu permasalahan – permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir harus dilihat tidak hanya disebabkan oleh aktivitas -aktivitas pada satu aspek kewilayaan tetapi kita kita harus melihat pada aspek dua kewilayaan(Ruang daratan dan Ruang Laut)

Berdasarkan hal tersebut maka Permasalahan - permasalahan di Teluk Banten

bukan semata – mata disebabkan oleh aktivitas yang ada di perairan saja tetapi banyak sekali di pengaruhi oleh aktivitas – aktivitas yang ada di daratan begitu juga sebaliknya.

Tabel 2.  
Aktivitas - Aktivitas di Pesisir Teluk Banten yang saling mempengaruhi

No	Kegiatan Darat yang mempengaruhi Perairan	Kegiatan Perairan yang mempegaruhi Daratan
1	Kegiatan reklamasi yang di lakukan di Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel maupun Reklamasi yang di lakukan di Kota Cilegon menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun dan salah satu dampak reklamsi dari reklamasi terjadinya perubahan arus yang dindikasikan sebagai salah satu penyebab terjadinya abrasi di kawasan kasemen, pontang dan tirtayasa di pesisir Teluk Banten	Penambangan pasir laut di perairan Lontar, Pulau Tunda, Pulau Panjang, di kecamatan Pontang dan Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten diindikasikan merusak ekosistem Teluk Banten. Pertama aspek ekologis adanya dampak kerusakan terhadap lingkungan/ekologis, secara teknis penambangan pasir laut dengan mengangkat/ menyedot pasir / material yang ada di dasar lautan akan mengangkat semua makluk hidup maupun sumber daya hayati atau yang ada di dasar laut setelah itu akan di pisah / dipilah pasir diambil sisanya di buang kembali kelaut sehingga akan terjadi kekeruhan yang menyebabkan ikan mati atau bermigrasi besar – besaran mencari perairan yang jernih. Kedua dari sisi Osneografi , Penambangan pasir laut

		menyebabkan perubahan arus laut, abrasi mengarah ke timur yang tadinya hanya berada di wilayah Tanjung Pontang sekarang mengarah ke pemukiman masyarakat.
2	Pola pemanfaatan lahan di hulu yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah mengakibatkan pada tingginya tingkat erosi hal ini mengakibatkan pendangkalan di sungai maupun muara sungai dan memberikan kontribusi terhadap sedimentasi di pesisir Teluk Banten	Adanya tumpahan gas, batubara dan limbah kapal yang diindikasikan ikut memberikan kontribusi terhadap tercemarnya perairan di Teluk Banten.
3	Pengembangan kawasan Industri dan pelabuhan di pesisir Teluk Banten dengan melakukan cut and fill diakibatkan sebagian wilayahnya kontur tanahnya berbukit – bukit sehingga untuk membangun kawasan Industri dan pelabuhan bukit – bukit di ratakan (cut) dan Hutan Magrove, padang lamun untuk di tebang dan di urug kesemuanya memberikan dampak pada kerusakan ekosistem di pesisir Teluk Banten	Adanya alat tangkap nelayan yang mengganggu alur pelayaran khususnya di kawasan pelabuhan Bojonegara dan beberapa pelabuhan TUKS yang dimiliki oleh industri – industri disepanjang pantai pesisir Teluk Banten.
4	Berbagai aktivitas manusia mulai dari hulu seperti kegiatan industri di kecamatan cikande, kibin dan kragilan dan kegiatan pertanian, pertambangan serta rumah tangga menyumbang pencemaran bahan organik dan anorganik, masuknya sampah/limbah B3 dll ke pesisir Teluk Banten melalui sungai – sungai yang bermuara di pesisir Teluk Banten. Sungai – sungai besar yang bermuara di Teluk Banten seperti DAS Ciluncing, DAS Cilengkong, DAS Cibanten, DAS Cikamayung, DAS Ciujung Lama dan DAS Ciujung itu sungai – sungai yang sudah tercemar sudah tidak sehat. Laut dijadikan sebagai TPA raksasa tempat pembuangan sampah dan buang limbah.	Pengambilan terumbu karang yang dilakukan nelayan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5	Kegiatan pertambangan batu dan pasir di daerah bojonegara mengakibatkan erosi percik, erosi alur sehingga ketika hujan masuk berbagai material kesungai dan aliran sungai membawa	

polutan masuk ke teluk mengakibatkan esturiah (pendangkalan) serta mengakibatkan, mangrove, padang lamun rusak semakin tercemarnya Teluk Banten.
--

Sumber : Hasil penelitian 2018

Berbagai aktivitas baik di darat maupun dilaut tersebut sedikit banyak menimbulkan permasalahan dan konflik antar aktor dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten. Dapat di simpulkan penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten sebagai berikut;

a. Belum efektifnya bentuk kepemilikan sumber daya di wilayah pesisir yang semula “*open acces*” menjadi “state property regime “ melalui controlled access” . Dalam *memanfaatan sumber daya pesisir sebagai Common-poll Resusrces/CPR* memicu konflik pemanfaatannya disebabkan perubahan ‘rezim’ pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah telah mengubah kewenangan pengelolaan sumberdaya di pesisir yang sebelumnya terpusat menjadi ‘ruang’ kewenangan terdesentralisasi pada daerah. Sementara itu, kebijakan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam penerapannya di era otonomi daerah justru menjadi

‘trigger’ konflik terbuka dan pada beberapa kasus menjadi anarkis. seperti terlihat dalam konflik antara perusahaan penambangan pasir laut di Teluk Banten dengan nelayan pada awalnya merupakan konflik tertutup, namun berkembang menjadi konflik terbuka dan berubah menjadi bersifat anarkis. Konflik antara perusahaan penambang pasir laut yang sementara terhenti karena adanya moratorium dan tidak adanya permintaan masif terhadap pasir laut dikarenakan dihentikannya proyek reklamasi Teluk Jakarta masih berpotensi akan terjadi kembali seiring belum adanya solusi secara mendasar, karenanya ketika ada ‘trigger’ konflik akan cenderung kembali bersifat anarkis. Analisis membuktikan bahwa ‘akar’ penyebab konflik antara nelayan dengan perusahaan penambang pasir yaitu rusaknya ekosistem Pesisir Teluk Banten yang berimbas terjadi penurunan pendapatan nelayan.

b. Perbedaan Kepentingan, Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik walaupun

berbagai pihak menerima fakta dan interpretasi yang sama serta mempunyai kesamaan nilai, perbedaan tentang siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan. Juga dapat terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban. Penggunaan dan pemanfaatan lahan existing di Teluk Banten sekarang ini di manfaatkan sebagai kawasan pemukiman, pertanian, industri, pariwisata, perikanan, pertambangan perdagangan, dan jasa. Serta kawasan konservasi. Terjadi persaingan antara masing – masing aktor untuk memaksimalkan kepentingannya misalkan antara sektor industri dengan sektor lainnya kita melihat bagaimana terjadinya alih fungsi lahan secara masif, lahan pertanian menjadi lahan industri serta hutan mangrove, terumbu karang menjadi kawasan reklamsi untuk kepentingan industri, perkembangan secara masif sektor industri dinilai oleh banyak kalangan mengorbankan sektor - sektor lainnya seperti pertanian, perikanan serta lingkungan. Begitu juga dengan perkembangan lainnya seperti sektor pertambangan khususnya pertambangan pasir laut dinilai banyak merugikan sektor-

sektor lainnya seperti perikanan dan lingkungan.

- c. Tujuan Bersaing yang memicu persaingan pemanfaatan ruang. Tujuan Bersaing sangat wajar bahwa konflik muncul saat pihak-pihak yang bertikai merasa mereka memiliki tujuan yang bersaing yang mereka percaya tidak sesuai satu sama lain. Kita melihat bagaimana masing – masing pihak berupaya untuk mengoptimalkan tujuannya seperti antara sektor industri dengan pertanian dan perikanan, antara sektor pertambangan pasir laut dengan perikanan. Sektor industri terus memicu pencapaian target industrinya dengan melakukan pengembangan dan perluasan sektor industri, begitu juga sektor pertanian dengan mencanangkan peningkatan produksi, dan perluasan areal pertanian hal yang sama juga dilakukan sektor perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap yang terus memicu produksinya dengan strategi meningkatkan produksi dan memperluas areal tambak dan areal tangkap. Hal senada juga dilakukan oleh sektor pertambangan khusus pertambangan pasir laut .
- d. Kerusakan atau degradasi lingkungan, Degradasi lingkungan seperti yang dinyatakan oleh Moran Moran (1987)

Hilangnya habitat alami oleh kegiatan pertanian, perladangan, pertambangan pemukiman dll. Degradasi lingkungan di Pesisir Teluk Banten ikut memicu konflik ditandai dengan banyaknya lahan basah berubah menjadi lahan terbangun, kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, Padang lamun, hutan mangrove, terjadinya erosi dan akresi, abrasi dan banjir rob serta tercemarnya perairan Teluk Banten. Kerusakan lingkungan tersebut memicu konflik diantara para aktor yang memanfaatkan sumber daya pesisir seperti Antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat serta antara pemerintah dengan masyarakat

- e. Pembatasan akses dirasakan sebagai salah satu penyebab konflik di pesisir Teluk Banten seperti konflik antara perusahaan dengan sebagian nelayan yang berada di pesisir Bojonegara sampai ke Polo Ampel, dimana perusahaan yang berada di bibir pantai tidak mengindahkan aturan sepadan antara perusahaan dan juga dianggap ingkar terhadap perjanjian awal dimana nelayan dijanjikan akan di buatkan tempat pendaratan perahu nelayan . Karena ada pembatasan akses ini menyebabkan nelayan merasa kesulitan akses menuju

perairan laut lepas. Begitu juga dengan pembatasan akses untuk pemanfaatan ekonomi atas sumber daya yang ada di pulau burung. Konservasi pulau burung tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya ikut memicu terjadinya kerusakan ekosistem Pulau Burung dan persoalan menjadi lebih rumit dengan terjadi sedimentasi disekitar pulau burung sehingga menyatunya pulau burung dengan pulau jawa, tanah hasil sedimentasi ini di klaim oleh masyarakat maupun pihak konservasi Pulau Dua (burung). Pembatasan akses bagi nelayan di pelabuhan bojonegara dan pelabuhan TUKS (terminal untuk keperluan khusus) yang dimiliki oleh perusahaan – perusahaan di sepanjang pesisir Teluk Banten ikut memicu konflik antara nelayan dengan pengelola pelabuhan.

- f. Ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang, dengan ditetapkannya kawasan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu sebagai kawasan industri di pesisir Teluk Banten, sector Industri terus menjadi prioritas sehingga sector– sektor lain seperti perikanan, pertanian, pariwisata apalagi konservasi merasakan ditinggalkan.. menjadikan sektor

industri sebagai prioritas dapat kita pahami disebabkan keunggulan geografis, dukungan fasilitas yang dimiliki Teluk Banten serta besarnya kontribusi industri pengolahan rata –

rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 34,53 % terhadap PDRB Provinsi Banten ( BPS, Banten dalam Angka 2017). Hal tersebut dapat di lihat pada table berikut ini ;

Tabel 2 Sumber konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten,

Konflik	Karakteristik Konflik	Penyebab Konflik
Konflik antara nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut	- Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal	- Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan. - Perbedaan Kepentingan - Ketidakadilan pemerataan hasil Pembangunan sebagai ketidakseimbangan pemanfaatan ruang
Konflik antara nelayan dengan Kalangan Industri	- Mencuat (Emerging) - Konflik Vertikal	- Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas). - Kerusakan Lingkungan - Ketidakadilan pemerataan hasil Pembangunan sebagai ketidakseimbangan pemanfaatan ruang
Konflik antara industri	- Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal	- Perbedaan Kepentingan - Garis batas wilayah pemanfaatan Perairan wilayah pesisir
Konflik Antara Nelayan	- Mencuat (Emerging) dan Tertutup (Latent) - Konflik Horizontal	Perbedaan Kepentingan Antara Nelayan
Konflik antara Nelayan dengan pengelola pulau dua	Konflik Tertutup (Latent)	- Pembatasan akses - Kemiskinan
Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima	Konflik Tertutup (Latent)	- Pembatasan Akses - Kemiskinan.
Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten	Mencuat (Emerging)	Perbedaan Persepsi di antara pewaris keluarga kesultanan Banten.
Konflik antara pengelola pelabuhan dengan nelayan	Tertutup (Latent)	- Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas) - Perbedaan Kepentingan
Konflik Tanah Timbul	Tertutup (Latent)	-

(Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2018)

## Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik bertujuan untuk memfasilitasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-kelompok yang bersengketa, sehingga sedapat mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui meja hukum. Terdapat beberapa teknik penyelesaian konflik. Seperti yang diungkapkan oleh Sarjono soekanto, 2010 :64 kompetisi, akomodasi, kompromi dan kolaborasi. Dari teknik penyelesaian konflik tersebut peneliti memilih teknik akomodasi sebagai teknik dalam penyelesaian konflik di Teluk Banten dengan pertimbangan penyelesaian konflik lebih bersifat permanen di mana pihak – pihak yang berkonflik mulanya saling bertentangan kemudian mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan diantara mereka. Beberapa tujuan dari akomodasi seperti yang dikutip dari soekanto antara lain untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok serta untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan, untuk sementara waktu atau secara temporer. Beberapa bentuk akomodasi yang dapat digunakan antara lain :*Coercion, Compromise, Arbitration, Conciliation, Toleration, Stalemate, Adjudication.* (wirawan : 210 : 132)

Pemilihan metode penyelesaian berbagai konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di pesisir Teluk Banten harus disesuaikan dengan karakteristik dari konflik yang terjadi berikut ini metode penyelesaian konflik yang dapat dilakukan ;

Resolusi konflik untuk konflik antara pemerintah dengan masyarakat, dimana konflik ini mempunyai karakteristik tertutup (latent) sampai dengan terbuka serta merupakan konflik vertikal , untuk jenis konflik dengan karakteristik seperti ini sebaiknya menggunakan resolusi konflik mulai dari *Coercion, Compromise sampai dengan Adjudication, di mana di tahap awal pemerintah bisa memaksakan kehendaknya (Coercion) untuk mengatur pihak- pihak yang berkonflik dengan otoritas yang dimiliki yang kemudian juga melakukan compromise* dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat melaksanakan *compromise* adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya ataupun menggunakan metode *Adjudication bagi pihak – pihak yang tidak mematuhi kesepakatan yang dilakukan.*

Resolusi konflik untuk konflik antara swasta/pengusaha dengan masyarakat, ini merupakan konflik vertikal yang disebabkan adanya ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing pihak yang berkonflik. Resolusi konflik untuk konflik yang mempunyai karakteristik seperti ini membutuhkan peran pemerintah untuk mendudukkan pihak – pihak yang berkonflik untuk melakukan Arbitration atau *Mediation*. Ketika konflik ini muncul, peran pemerintah memfasilitasi penyelesaian konflik antara pihak – pihak yang berkonflik untuk mewujudkan kompromi – kompromi untuk kedua belah pihak dengan menghasilkan kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak. Peran

selanjutnya dari pemerintah adalah memastikan kedua belah pihak menjalankan kesepakatan- kesepakatan tersebut.

Resolusi konflik untuk konflik antara masyarakat dengan masyarakat, ini merupakan konflik horizontal di mana pihak – pihak yang berkonflik mempunyai perbedaan persepsi dan kepentingan. Resolusi konflik untuk konflik yang mempunyai karakteristik seperti ini membutuhkan peran pemerintah untuk mendudukkan pihak – pihak yang berkonflik untuk melakukan *Mediation* dan *Compromise* sehingga menghasilkan kesepakatan – kesepakatan bagi pihak – pihak yang berkonflik.

*Tabel 3 Resolusi Konflik dalam penyelesaian konflik di Pesisir Teluk Banten*

Konflik	Karakteristik Konflik	Penyebab Konflik	Resolusi Konflik
Konflik antara nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut	- Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal	Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan.	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i> - Arbitration - Mediation
Konflik antara nelayan dengan Kalangan Industri	- Muncul (Emerging) - Konflik Vertikal	- Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas). - Kerusakan Lingkungan	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i> - Arbitration - Mediation
Konflik antara industri	- Muncul (Emerging) - Konflik Horizontal	Garis batas wilayah pemanfaatan Perairan wilayah pesisir	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i> - Arbitration Mediation
Konflik Antara Nelayan	- Muncul (Emerging) dan Tertutup	Perbedaan Kepentingan Antara Nelayan	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i>

	(Latent) - Konflik Horizontal		- <i>Arbitration</i> - <i>Mediation</i>
Konflik antara Nelayan dengan pengelola pulau dua	Konflik Tertutup (Latent)	- Pembatasan akses - Kemiskinan	- <i>Compromise</i> - <i>Adjudication</i>
Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima	Konflik Tertutup (Latent)	- Pembatasan Akses - Kemiskinan.	Di butuhkan peran pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan - <i>Compromise</i>
Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten	Mencuat (Emerging)	Perbedaan Persepsi di antara pewaris keluarga kesultanan Banten.	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i> - <i>Arbitration</i> - <i>Mediation</i> - <i>Compromise</i>
Konflik antara pengelolah pelabuhan dengan nelayan	Tertutup (Latent)	- Pembatasan akses Masyarakat - Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas. - Kapal sering berlabuh di tempat yang tidak semestinya.	<i>Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :</i> - <i>Arbitration</i> - <i>Mediation</i>
Konflik Tanah Timbul	Tertutup (Latent)	-	- <i>Coercion</i>

## SIMPULAN

Hasil Penelitian ini memberikan pemahaman yang integral mengenai konflik dalam pemanfaatan sumber daya di pesisir Teluk Banten sehingga kita mendapat gambaran yang komprehensif terkait dengan peta konflik, faktor – faktor yang menyebabkan konflik serta resolusi dalam penyelesaian konflik.

Sumber atau penyebab konflik di pesisir Teluk Banten antara lain ; a) Belum efektifnya bentuk kepemilikan

sumber daya di wilayah pesisir yang semula “*open acces*” menjadi “*state property regime* “ melalui *controlled access*” b) Perbedaan Kepentingan, c) Tujuan Bersaing d) Kerusakan atau degradasi lingkungan, e) Pembatasan akses serta ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan. Penyelesaian berbagai konflik di pesisir Teluk Banten dapat menggunakan metode *coercion, arbitration, mediation, compromise, hingga Adjudication* sesuai dengan karakteristik konflik yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bossel., Hartmut. (1999). Indicators for sustainable development : theory, method, applications : a report to the Balaton Group. International Institute for Sustainable Development. Canada.
- Cresswell, J. W. (2013). Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cicin-Sain, B, R.W. Knecht and G Fisk. 1995 Growth in capacity for Integrated coastal management since UNCED : an internasional perspective. Ocean & Coastal Management
- Dahuri Rokhim , dkk (2008) Sumber daya wilayah pesisir dan Lautan secara terpadu , edisi ke -4, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Diposaptono Subandono. 2015. Membangun Poros Maritim Dunia: Dalam Perspektif Tata Ruang Laut. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Direktirat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta. (328) : 196 – 197.
- Dwi Ernaningsih, Domu Simbolon, Eko S.Wiyono, Ari Purbayanto (2011), Zonasi Pemanfaatan Kawasan Perikanan Tangkap di Teluk Banten jurnal Marine Fisheries Vol. 2, No. 2, November 2011 Hal: 177-187
- Fisher S, D.I., Abdi, J., Ludin, R., Smith, S., Williams, 2000. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Kartikasari, S. N, M. D. Lapilatu, R. Maharani dan D. N. Rini (Penterjemah). Jakarta : The British Council
- Fisher S, Abdi DK, Ludin J, Smith R, Williams S and Williams S. 2001. *Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak*. The British Council, Jakarta, Indonesia.
- Hendricks, William. 2004. *Bagaimana Mengelola Konflik, Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*. Penerjemah Arif Santoso. *How to Manage Conflict*. Cet. V. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- La Sara, Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan solusi Pembangunan Bangsa, Bandung, Alfabet
- Lekipiouw. *H Sherlock Model Penataan Ruang Laut*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

- Miles, Matthew B, Huberman M A. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mujio .et.al Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Perairan Pesisir Sodaloty: Jurnal Sosiologi Pedesaan , Agustus 2016, hal 139-144
- Kinseng, Rilus A, Soldality (2007 : Konflik-konflik Sumber daya Alam di Kalangan Nelayan di Indonesia , jurnal transdisiplin Sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia) Vol.01, No, 01
- Satria (2009) . Pesisir dan Laut Rakyat. Bogor: IPB Press.
- Wirawan (2010), Konflik dan manajemen Konflik, Teori, aplikasi dan penelitian Jakarta : Salemba Humanika
- Dokumen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil